

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah subjek yang membahas bagaimana sekelompok orang berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka dapat mengubah keadaan hubungan bilateral. Definisi hubungan internasional adalah studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan internasional dan multinasional. Sedangkan Hubungan Internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan-kekuatan, dan tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berpikir dari manusia (Darmayadi, 2015).

Menurut Coulombis dan Wolfe, "Hubungan internasional adalah studi sistematis tentang fenomena yang dapat diamati dan upaya untuk menemukan variabel mendasar yang menjelaskan perilaku dan mengungkapkan karakteristik atau tipe penting." hubungan antar unit sosial.

Menurut Mohtar Mas'oeid, "Hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan negara-negara yang masing-masing negara memiliki kedaulatan, sehingga membutuhkan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara".

Dalam proses perkembangannya, hubungan internasional mencakup semua hubungan yang dilakukan antara negara maupun non-pemerintah yang melintasi batas-batas yuridis masing-masing negara dan menjadi langkah diplomasi bagi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Dalam hubungan internasional, perhatian tidak hanya diberikan kepada aktor negara, tetapi juga aktor lain, seperti organisasi internasional, perusahaan internasional, atau orang-orang berpengaruh. Aktor non-pemerintahan yang didalamnya terbagi atas beberapa aktor yaitu, IGO (International Government Organization), NGO (Non-Government Organization), MNC (Multi National Corporation), dan terakhir individu. Aktor non-pemerintahan hadir setelah diyakini bahwa sistem nation state yang sebelumnya menjadi aktor dalam hubungan internasional dianggap tidak efektif, karena negara tidak selalu dapat menyelesaikan berbagai urusan.

Hubungan internasional dapat dilihat sebagai penurunan peran negara sebagai aktor dalam politik dunia, dengan penambahan peran aktor non-negara. Batas-batas sebagai pemisah antara negara kabur dan tidak berarti. Bagi beberapa aktor non-negara, bahkan batas geografis tidak diperhatikan (Perwita dan Yani, 2017: 4)

Terkadang hubungan internasional juga dapat menjadi subjek penelitian teoretis, praktis atau politik, dan pendekatan hubungan internasional dapat berupa empiris atau normatif. Hubungan internasional mencakup semua jenis hubungan antar bangsa dan kelompok etnis dalam masyarakat dunia, serta kekuatan dan tekanan, proses yang menentukan cara orang hidup, bertindak dan berpikir.

Dalam hubungan internasional terdapat disiplin ilmu hubungan internasional yang dimana secara resmi didirikan setelah Perang Dunia Pertama untuk mencegah konflik besar di masa depan dan memastikan transisi yang damai. Ini tentu tujuan yang layak, tetapi saat ini ruang lingkup dan kompleksitas politik dunia membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang terjadi dalam hubungan internasional. Ada banyak pakar atau pakar yang mengemukakan pengertian hubungan internasional.

Disiplin hubungan internasional adalah bidang studi akademik yang kompleks mempelajari hubungan dan interaksi antara negara dan aktor internasional lainnya di seluruh dunia. Para ahli dan akademis telah memberikan definisi yang berbeda untuk disiplin ini. Menurut Hans Morgenthau: Dia adalah seorang ahli teori politik dan penulis buku "Politics Among Nations". Morgenthau mengartikan hubungan internasional sebagai ilmu yang menggambarkan dan menjelaskan prinsip-prinsip perilaku politik negara-negara.

Perkembangan ilmu hubungan internasional dapat lebih baik meminjam model perkembangan ilmu yang dikemukakan oleh Kuhn. Menurutnya, ilmu hubungan internasional berkembang sedikit demi sedikit, dan pada setiap tahapannya didominasi oleh paradigma tertentu. Secara tradisional, hubungan internasional memiliki dua teori utama, yaitu liberalisme dan realisme. Pada masa kejayaannya, liberalisme disebut sebagai teori "utopis". Dan sampai batas tertentu masih diakui. Pendukungnya menganggap orang-orang hebat dan percaya bahwa perdamaian dan harmoni antar bangsa tidak hanya dapat dicapai tetapi diinginkan untuk semua. Pada akhir abad ke-18, Immanuel Kuhn mengembangkan gagasan

bahwa negara-negara dengan nilai-nilai liberal tidak memiliki alasan untuk berperang satu sama lain. Menurut Kuhn, negara paling liberal di dunia adalah yang paling damai karena warga negara yang memimpin negara liberal dan mendukung perang bahkan jarang menolaknya. Kaum liberal modern menggemakan dan mengembangkan gagasan Kantian ini, terutama dalam teori perdamaian demokratis, di mana demokrasi tidak berperang satu sama lain. Oleh karena itu teori hubungan internasional diterima atau ditolak melalui konsensus, bukan melalui proses pemalsuan yang tegas (posisi yang didasarkan pada pihak yang salah). Akan tetapi, keberhasilan suatu paradigma baru biasanya tidak condong pada penggulingan paradigma lama, sehingga dalam satu periode dapat terjadi beberapa paradigma yang saling bersaing, masing-masing dengan dukungan yang signifikan. Pada periode Kuhn seperti itu disebut paradigmatik. Dengan kata lain, tema umum dalam teori hubungan internasional saat ini adalah keragaman dan ketidaksepakatan. Situasi ini menjadi semakin jelas sejak akhir 1960-an, ketika ada kecenderungan kuat untuk mengevaluasi teori dalam ilmu tersebut dengan asumsi nilai yang mendasarinya. Dimasukkannya variabel nilai mengungkapkan keragaman pemikiran teoretis di bidang hubungan internasional (Mas'ood, 1990: 13).

Pandangan lain adalah bahwa hubungan internasional tidak boleh dilihat sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan sebagai suatu disiplin ilmu dengan perspektif pendekatan khusus yang dapat menterjemahkan dan memahami dimensi empirisnya secara keseluruhan. Perkembangan studi hubungan internasional juga sangat dipengaruhi oleh tatanan politik internasional akhir abad ke-19.

Hubungan internasional juga merupakan studi tentang pola aksi dan reaksi yang diwakili di negara berdaulat. Menurut para ahli, hubungan internasional memiliki beberapa definisi, seperti J.C. Johari, Couloumbis dan Wolfe, Mochtar Mas'od dkk. Teori hubungan internasional seperti realisme, liberalisme, konstruktivisme, Marxisme, feminisme dan teori keamanan dapat menawarkan perspektif yang berbeda untuk memahami dan menganalisis hubungan internasional.

Menurut Jonathan Cristol, teori HI adalah teori yang mencoba menjelaskan perilaku suatu negara di masa lalu dan memprediksi perilaku masa depan. Teori hubungan internasional membantu kita menjelaskan dunia hubungan internasional. Teori hubungan internasional menciptakan kerangka konseptual yang memfasilitasi pemahaman dan penjelasan tentang peristiwa dan fenomena dalam politik dunia di mana hubungan internasional dapat dianalisis, serta analisis dan informasi tentang keterkaitan kebijakan dan praktik hubungan internasional. Dengan kata lain, teori HI adalah seperangkat gagasan yang menjelaskan fungsi sistem internasional. Teori-teori utama penelitian hubungan internasional adalah: teori Realis, teori Libertarian dan teori Konstruktivis.

Meskipun demikian, teori-teori lain dalam Hubungan Internasional seperti Liberalisme, Rasionalisme, Marxism, Teori Kritis, dan Pos-Modernisme juga dapat memberikan pemahaman yang relevan terhadap konflik pada setiap negara. Seperti yang ditunjukkan oleh pengantar singkat teori HI, setiap teori memiliki pandangan dunia yang valid tetapi berbeda. Memang, selain teori-teori yang diulas di atas, masih banyak teori dan perspektif lainnya. Penting juga untuk dicatat bahwa

hubungan internasional masih merupakan bidang atau bidang pengetahuan yang relatif baru lahir dan sedang dalam proses perkembangan formal yang signifikan. Penting untuk diingat bahwa teori adalah alat analisis. Seringkali sebuah teori bermakna dan dapat dipahami ketika diterapkan dengan benar pada suatu peristiwa. Akan tetapi, sering kali teori tersebut tetap tidak lengkap atau tidak sempurna dan teori yang cocok untuk penelitian dapat ditemukan.

2.1.2 Keamanan Internasional

Keamanan merupakan salah satu topik yang paling kompleks dalam studi hubungan internasional, sehingga keamanan merupakan salah satu konsep yang paling banyak dibicarakan di dunia. Bidang keamanan menjadi salah satu bidang penelitian hubungan internasional yang paling menonjol sejak berakhirnya Perang Dingin akibat globalisasi yang kini terjadi secara masif di bidang ekonomi, sosial dan budaya maupun di tempat lain. Bidang yang tidak konvensional, Serta ancaman keamanan seperti terorisme yang mengancam jiwa.

Dalam dunia internasional, keamanan memiliki kedudukan yang sangat penting, dan ketika keamanan nasional terganggu maka keamanan internasional terganggu karena berdampak pada negara-negara sekitarnya. Menurut Barry Buzan, keamanan dalam arti obyektif mengukur ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh, dalam arti subyektif tidak ada ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang (Buzan, 2008: 2, 4, 12).

Saat ini, aktornya tidak hanya negara, tetapi juga aktor lain dengan kapasitas operasional yang lebih besar, seperti organisasi kriminal internasional, organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah internasional, serta perusahaan

internasional, yang juga memiliki pengaruh yang sedikit banyak. Kurangnya kepercayaan adalah tidak adanya ancaman atau bahaya untuk menciptakan ruang yang tenang tanpa kecemasan.

Secara etimologis, keamanan atau security berasal dari bahasa latin yaitu securus (se+cura) yang berarti bebas dari bahaya dan bebas dari rasa takut. Singkatnya, keselamatan dapat dijelaskan sebagai kondisi yang bebas dari bahaya dan bahaya (Pratitya 2016). Tentu ruang aman ini diinginkan tidak hanya oleh negara-bangsa, tetapi juga oleh individu dan kelompok. Secara terminologi, konsep keamanan terbagi menjadi dua bagian. Yakni keamanan dari pendekatan tradisional dan keamanan dari perspektif non-tradisional (Buzan 1991).

Keamanan dalam hubungan internasional telah bergeser dari konsep tradisional tentang prioritas perang dan perdamaian ke konsep modern tentang prioritas keamanan manusia dan aspek lainnya, sehingga tidak berfokus pada hubungan antar negara, tetapi juga pada keamanan manusia. Fokus utama perang bergeser ke individu. Keamanan internasional mencakup berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara atau organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan kelangsungan hidup dan keselamatan semua. Konsep keamanan telah berkembang selama bertahun-tahun hingga saat ini, ruang lingkupnya berkisar dari jenis militer tradisional, yaitu kekuatan militer konvensional, penyebab dan konsekuensi perang, kekuatan ekonomi, konflik etnis, agama dan ideologis, konflik komersial dan ekonomi, pasokan energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, nutrisi dan pencemaran lingkungan, penyakit menular,

perubahan iklim dan aktivitas kandang non-negara dan keamanan hingga kandang manusia dan negara.

Selama Perang Dingin, literatur keamanan didominasi oleh konsep keamanan nasional, yang sebagian besar didefinisikan secara militer. Dari perspektif ini, keamanan nasional, yang diukur dengan kepemilikan kekuatan militer suatu negara, adalah yang terpenting. Gagasan keamanan negara karena mengutamakan keamanan negara dan sempit karena menitikberatkan pada sisi militer keamanan nasional. Kritik datang dari banyak sisi, seperti penjelasan bahwa keamanan harus mencakup lima aspek, yaitu keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan militer, sehingga fokus utama dapat diubah menjadi keamanan internasional (Buzan, 2008: 10).

Keamanan juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk bertahan dari ancaman nyata. Konsep keamanan dalam studi keamanan internasional adalah salah satu bidang penelitian terpenting yang berkembang dalam diskusi dari keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional. Barry Buzan mengatakan dalam bukunya *People, States and Fear* bahwa “keamanan, dalam arti objektif apa pun, adalah ukuran yang menunjukkan tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diterima dalam arti subyektif, kurangnya rasa takut bahwa nilai-nilai ini akan hilang. Diserang” (Buzan, 2008:36). Menurut Buzan, ada lima faktor yang mempengaruhi perkembangan riset keamanan, antara lain:

1. *Great power politics,*
2. *Technology,*
3. *Event,*

4. *Institutionalization, dan*

5. *Academic debate.*

Barry Buzan juga menginterpretasikan konsep keamanan tidak hanya mencakup aspek militer dan aktor negara, tetapi juga aspek non-militer dan non-subyektif. Dalam bukunya yang berjudul “People, States and Fear”, Buzan membagi keamanan menjadi 5 (lima) bidang, yaitu:

1. Militer,
2. Lingkungan,
3. Politik,
4. Ekonomi, dan
2. Masyarakat.

Aspek militer hanya merupakan salah satu aspek penting dari aspek keamanan, tetapi lebih kepada perdamaian dan keamanan. Ada perubahan dalam aspek keamanan yang dipahami dalam banyak hal dan bagaimana melindungi negara dan individu di dalamnya. Contohnya adalah munculnya lembaga atau penelitian ilmiah baru di dunia akademik. Kemudian, dalam unsur debat akademik, Buzan dan Hansen (2009) berpendapat bahwa analisis dalam ilmu sosial sangat penting untuk memahami dan mempelajari suatu isu dalam dunia hubungan internasional.. (Barry Buzan & Lenen Hensen 2009) Dalam arti keamanan adalah suatu kondisi dimana suatu negara meningkatkan pertahanan dan keamanannya untuk menghindari ancaman dari luar yang membuat negara sekitarnya merasa terancam dan melakukan tindakan serupa, dimana kondisi tersebut dapat

menimbulkan ketegangan bahkan memicu konflik yang disebut. Masalah keamanan.

Negara memandang usahanya bersifat defensif, yaitu upaya untuk melemahkan kemampuan musuh untuk menguasai sesuatu negara dengan tujuan melawan pihak penyerang untuk meminimalkan korban jiwa jika pencegahan gagal. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Sehingga konsep keamanan berkembang seiring dengan isu-isu nontradisional seperti terorisme, siber, kemanusiaan dan lingkungan, yang berdampak negatif terhadap tatanan dunia di seluruh dunia. Selain itu, aktor yang terlibat tidak hanya negara, tetapi juga aktor non negara, seperti organisasi kriminal transnasional atau individu yang melakukan kejahatan dan mengganggu stabilitas nasional atau bahkan global.

Dalam konsep keamanan terdapat sebuah perdebatan baru tentang keamanan yang diperdebatkan adalah:

1. Keamanan Bersama (*Common security*).

Diperkenalkan oleh komisi Palme pada 1980-1981. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kecurigaan terhadap niat pihak lain untuk mencegah konflik bersenjata. bersenjata.

2. Keamanan Komprehensif (*Comprehensive security*).

Keamanan ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, negara berkewajiban untuk menjamin keamanan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan disamping keamanan material militer bagi setiap warga negara.

Dari keamanan inilah muncul konsep keamanan manusia. (*human security*)

3. Keamanan Kooperatif (*Cooperative security*).

Bentuk kerja sama keamanan yang paling longgar. Menggunakan semua saluran berurusan dengan semua aspek keamanan. Bentuk kerjasama lunak (transparansi, regulasi dan tidak ada kekuatan koersif).

Dengan semakin banyaknya masalah yang muncul dalam hubungan internasional, keamanan bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga dapat berkaitan dengan ekonomi internasional, dengan demikian terdapat tujuh kategori keamanan, yaitu :

1. Keamanan Ekonomi.
2. Keamanan Pangan.
3. Keamanan Kesehatan.
4. Keamanan Lingkungan Hidup.
5. Keamanan Pribadi.
6. Keamanan Komunitas.
7. Keamanan Politik. (United Nations Development Programme, Human Development Report 1994)

Keamanan internasional mengacu pada upaya organisasi nasional dan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara-negara di kawasan dunia. Upaya tersebut meliputi kegiatan, upaya dan operasi militer dan nonmiliter, serta pendekatan diplomasi seperti perjanjian dan konvensi. Dalam pendekatan tradisional, keamanan didefinisikan secara geopolitik dan terbatas pada isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antar negara dan penggunaan nuklir dan senjata perang lainnya serta strategi militer.

Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers. Buku ini memperkenalkan pendekatan yang lebih luas dalam memahami keamanan internasional, termasuk ancaman non-militer, seperti keamanan lingkungan, keamanan energi, dan keamanan manusia.

Keamanan sangat penting dan harus dipenuhi oleh negara, karena menyangkut rasa percaya diri masyarakat. Dengan demikian, negara dapat terbebas dari ancaman baik internal maupun eksternal negara itu sendiri.

2.1.3 Konflik Dalam Hubungan Internasional

Dalam hubungan internasional, konflik merupakan kajian atau perdebatan yang sangat panjang dengan batas-batas yang tidak terbatas. Ini karena perspektif sejarah umat manusia. Graham Evans dan Jeffrey Newnham berpendapat bahwa konflik adalah keadaan di mana dua atau lebih aktor mengejar tujuan yang sama dan berada dalam konflik satu sama lain.

Dalam menelaah lebih lanjut kita dapat mengetahui definisi konflik, tanpa mengetahui apa arti konflik, sulit bagi kita untuk memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah konflik. Secara etimologis, konflik berasal dari kata latin *configere* yang berarti memukul. Webster menyatakan bahwa bahasa asli dari istilah "konflik" berarti pertempuran atau peperangan.

Konflik adalah persepsi atau pandangan tentang perbedaan kepentingan, atau keyakinan bahwa karena adanya perbedaan tersebut maka keinginan pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dipenuhi secara bersamaan. Konflik terjadi ketika dua orang atau lebih tidak setuju tentang perbedaan pendapat, ketegangan, kesulitan

para pihak. Pendekatan geopolitik sangat cocok untuk menganalisis bagaimana sengketa teritorial mempengaruhi perilaku politik dan militer negara.

Pada dasarnya ada empat tipe konflik, yaitu:

1. No Konflik – Tidak ada akar konflik dan tidak ada konflik di permukaan
2. Laten konflik – Ada akar konflik tapi belum muncul
3. Surface konflik – Ada konflik dipermukaan tapi tidak ada akar konflik
4. Open konflik – ada akar konflik dan ada konflik yang terbuka

Dalam bukunya *Conflict Resolution: War, Peace and The Global System*, Peter Wallensteen Jemadus menyebutkan tiga jenis konflik internasional, yaitu: (1) konflik antar negara, (2) konflik antar negara, dan (3) konflik pembentukan negara. Mengenai konflik di Mindanao bagian selatan Filipina antara pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro di Mindanao merupakan konflik internal di Filipina. Oleh karena itu, kajian konflik internal menjadi sangat penting dalam kajian pustaka ini. Di antara sekian banyak kemungkinan teori konflik internasional yang dapat disajikan di sini, peneliti sengaja memilih teori yang berkaitan dengan konflik Mindanao di selatan Filipina.

Konflik itu sendiri dapat berlanjut selama beberapa dekade dengan durasi yang tidak terbatas karena tindakan yang tiba-tiba. Kejutan suatu negara, dapat meningkatkan ketegangan dan ancaman terhadap pihak lawan. Sedangkan kondisi tersebut memaksa pihak lawan mengambil keputusan untuk mengatasi konflik.

Dalam sebuah konflik terdapat teori konflik dalam hubungan internasional yang dimana merupakan salah satu pendekatan analitis yang digunakan untuk

memahami dan menjelaskan konflik, perselisihan dan pertentangan antara negara dan antar aktor internasional di seluruh dunia.

Karl Marx: Marx adalah seorang filsuf dan teoriwan sosialis yang memberikan kontribusi penting terhadap teori konflik. Menurutnya, konflik di tingkat internasional dihasilkan oleh pertentangan antara kelas sosial dan eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis terhadap negara-negara yang lebih lemah. Teori ini menarik perhatian pada konflik aktual dan potensial antara aktor negara dan mengkaji bagaimana stabilitas internasional dapat dipertahankan dalam situasi konflik. salah satu pendekatan atau kerangka analisis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis konflik, perselisihan, dan konfrontasi antara negara dan aktor internasional di seluruh dunia. Beberapa poin penting tentang teori konflik dalam hubungan internasional adalah:

1. Penyebab konflik: Teori konflik mencari penyebab utama yang memicu konflik internasional. Faktor penyebab konflik adalah persaingan kekuasaan, perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan ekonomi, sengketa wilayah, perbedaan identitas budaya dan etnis, dan persaingan ideologis.
2. Peran kekuasaan: Teori konflik menekankan pentingnya kekuasaan sebagai penggerak utama konflik. Negara dan aktor internasional berusaha untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan untuk mencapai tujuan nasional mereka dan melindungi kepentingan mereka.
3. Konsekuensi konflik: Teori konflik mempelajari efek dan konsekuensi dari konflik internasional. Konflik dapat menyebabkan kerusakan ekonomi,

kerusakan lingkungan, penderitaan manusia dan meningkatkan ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan dan dunia.

4. **Diplomasi dan Resolusi Konflik:** Sementara teori konflik berfokus pada analisis dan pemahaman konflik, teori ini juga membahas upaya diplomatik, negosiasi, dan mediasi untuk menemukan cara damai untuk menyelesaikan atau mengurangi konflik internasional.
5. **Konflik dalam Konteks Global:** Teori konflik tidak hanya mencakup konflik antar negara, tetapi juga konflik yang melibatkan aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok advokasi. Isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan dunia maya, terorisme, dan pandemi juga dapat menimbulkan konflik di tingkat internasional.

Teori konflik membantu untuk memahami dinamika konflik internasional yang kompleks dan telah memberikan para politisi dan analis hubungan internasional dengan pengetahuan yang berharga untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kerjasama antara negara dan aktor internasional. Max Weber: Weber, seorang sosiolog, menekankan peran pemahaman tentang tindakan individu dan kelompok dalam menjelaskan konflik internasional. Dia menganggap konflik sebagai bagian alami dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi para aktor.

2.1.4 Kepentingan nasional

Dalam hubungan internasional, seluruh negara yang ada di dunia ini pasti memiliki tujuan dan rencana masing-masing yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu kepentingan nasional sangat penting dan

diperlukan bagi negara. Dalam kondisi internal mereka, baik secara politik, militer, maupun sosial budaya, kepentingan ini terlihat jelas juga atas dasar “kekuasaan”. Kepentingan nasional adalah upaya suatu negara untuk memenuhi kebutuhan internal rakyatnya untuk kelangsungan hidup. Menurut Hans J Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik dan budayanya dari campur tangan negara lain dan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan negara dari negara lain. Rosenau menjelaskan bahwa kepentingan nasional digunakan sebagai alat politik dan juga sebagai alat politik untuk menentukan apa yang terbaik bagi negara dalam hubungan eksternal (Rosenau, 2006:46).

Dengan pemikiran Morgenthau adalah bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan moral, legal dan ideologis, yang dianggap utopis bahkan berbahaya. Morgenthau berpendapat bahwa kepentingan nasional negara mana pun adalah kekuasaan, yaitu segala sesuatu yang dapat membangun dan mempertahankan kendali satu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau kontrol ini dapat dibangun melalui teknik koersif atau kooperatif. Dengan demikian, Morgenthau membangun konsep-konsep abstrak yang maknanya tidak mudah didefinisikan, yakni kekuasaan dan kepentingan, yang dianggapnya sebagai sarana sekaligus tujuan aktivitas politik internasional. (Perwita dan Yani, 2005b)

Dengan demikian, pemahaman Morgenthau tentang kepentingan nasional mengakui bahwa perebutan kekuasaan antar negara memiliki keterbatasan dibandingkan dengan politik dalam negeri. Inilah salah satu alasan mengapa

Morgenthau mendorong para pejabat asing untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (balance of power) (Baylis, 2020: 137).

Kepentingan nasional menjadi sangat berpengaruh agar negara memenuhi kebutuhan politik, sosial dan ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Kepentingan negara sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, dimana negara menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mencapai kepentingannya. Dengan demikian, kebijakan luar negeri negara dapat dilihat dari kepentingan nasional negara itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional dapat dilihat dari perspektif tindakan dan keputusan ideologis serta identitas negara.

Dalam realisasinya, kepentingan nasional berbeda, yaitu kepentingan esensial dan sekunder. Sedangkan kepentingan sekunder adalah kepentingan yang ingin dicapai oleh negara dan tidak berkaitan langsung dengan keberadaan negara. Kondisi global yang terus berubah menuntut politik luar negeri menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga menyesuaikan dengan kondisi negara lain dan kondisi global. Menurut Holst, tujuan negara adalah tujuan keamanan, otonomi, kesejahteraan dan penghargaan.

Dalam sebuah kepentingan suatu negara untuk menampilkan identitasnya tentu memiliki kelebihan. James N Rosenau menjelaskan pertama sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi kebijakan luar negeri dan kedua sebagai alat tindakan politik yaitu alat untuk mengkritik, membenarkan atau mengusulkan kebijakan. Oleh karena itu, negara mitra tidak akan menyesal di kemudian hari (Putri Aini Zahra, 2013).

Kepentingan nasional juga memiliki konsep kepentingan nasional yang sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku negara asing. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan utama dan faktor penentu akhir yang memandu para pengambil keputusan negara dalam perumusan politik luar negeri. Kepentingan nasional suatu negara biasanya merupakan unsur-unsur yang merupakan kebutuhan terpenting negara tersebut, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Menurut Drs. R. Soerapto mengatakan dalam bukunya: “Kepentingan nasional diakui sebagai konsep sentral politik luar negeri. Menurut kepentingan nasional, orang dapat berorientasi pada ideologi atau berorientasi pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Artinya keputusan dan tindakan politik luar negeri dapat didasarkan pada kepentingan.”

Konsep kepentingan nasional mengandung pengertian bahwa negara memiliki peran sebagai aktor utama perumusan politik yang mandiri dan berdaulat. Selain itu, setiap negara berusaha mencapai kepentingan nasionalnya dalam mekanisme interaktif. Manfaat-manfaat itulah yang akhirnya dirumuskan sebagai istilah “kekuasaan”, manfaat didefinisikan dalam terminologi kekuasaan (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional timbul dari kebutuhan negara, yang dapat dilihat dari kondisi internalnya, dan kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial budaya. Kepentingan juga didasarkan pada “kekuasaan”, yang ingin diciptakan agar negara dapat secara langsung mempengaruhi aspek-aspek negara untuk mencapai

pengakuan global. Peran negara sebagai pemasok material sebagai basis kepentingan nasional mau tidak mau harus hadir di depan mata masyarakat internasional sebagai negara yang menciptakan relasi dengan politik luar negerinya. Dengan demikian, secara konseptual, kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku kebijakan luar negeri negara (Sitepu, 2011: 163).

Menurut para penganut realis yang mendefinisikan dari kepentingan nasional adalah sebagai berikut: “Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (survival) dalam politik internasional” (Perwita & Yani, 2005: 35)

2.2 Kerangka pemikiran

Pada tahap pertama peneliti akan berusaha menggali konflik internal yang terjadi pada negara Ukraina yang diikuti oleh respon dari Rusia terhadap konflik internal tersebut sehingga menyebabkan ketegangan antara dua negara mantan anggota Uni Soviet, kemudian pada akhirnya peneliti akan berusaha untuk mendalami kepentingan Rusia dalam melakukan intervensi terhadap konflik internal negara Ukraina dengan menggunakan Wagner Private Military Company sebagai tentara bayaran dan pada akhirnya akan mengungkapkan bahwa tindakan Rusia didasarkan pada kepentingan dalam tolak ukur kekuasaan.

Dimana setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Melalui kepentingan nasional tersebut setiap negara melakukan berbagai upaya dalam mencapai tujuannya. Dalam mencapai kepentingannya, Rusia melakukan strategi yang dimana strategi yang digunakan adalah menggunakan hybrid warfare dengan menggabungkan kekuatan militer dan non-militer, selain itu juga adanya keterlibatan non-aktor dalam penggunaan metode hybrid warfare tersebut.

Dengan terjadinya Konflik antara Ukraina dan Rusia ini berawal dari adanya perbedaan kepentingan antar dua negara tersebut. Keinginan Rusia untuk menyatukan kembali negara-negara bekas jajahan Uni Soviet dan keinginan berbeda dari Ukraina yang ingin bergabung bersama negara-negara Barat. Terutama dengan NATO. Perbedaan inilah yang menjadi dasar konflik ini. Mediasi menjadi salah satu upaya terbaik saat ini untuk menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa menjadi mediator dalam konflik ini karena rekam jejaknya yang bagus dalam hal mediator penyelesaian konflik.

Selain itu, Rusia membantu masyarakat pro-Rusia yang berada di wilayah Ukraina Timur dalam melakukan tindakan separatistis yang terjadi di daerah Donetsk dan Luhansk. Dari strategi yang digunakan dan menimbulkan adanya konflik memberikan dampak yang berpengaruh terhadap kondisi dan situasi kedua negara tersebut, bagaimana hubungan kedua negara dan kondisi domestik kedua negara khususnya Ukraina. Akan tetapi, strategi tersebut membuat Rusia dapat mencapai kepentingan nasionalnya yang salah satu diantaranya yaitu mempertahankan

pengaruhnya di Ukraina dan mempertahankan armada laut hitam yang ada di Semenanjung Krimea.

Gambar 2. 1 Bagan Alur pemikiran

